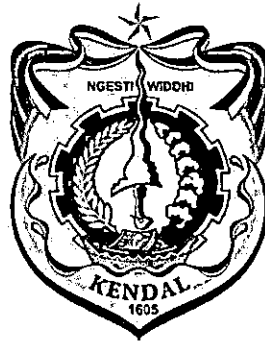


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat
Kabupaten/Kota**

Tahun Anggaran : 2026

A. LATAR BELAKANG

Perpustakaan sebagai institusi publik memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan informasi, edukasi, dan literasi yang inklusif. Di era modern yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender, pelayanan perpustakaan dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari perspektif gender. Dalam konteks Kabupaten Kendal, upaya mewujudkan perpustakaan yang responsif gender menjadi sangat relevan, mengingat beragamnya profil pengguna layanan perpustakaan, baik dari sisi usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, maupun latar belakang sosial-budaya.

Berdasarkan data kunjungan perpustakaan Kabupaten Kendal dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya tren perbedaan partisipasi antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan per tahun menunjukkan ketimpangan yang dapat mengindikasikan adanya hambatan struktural atau kultural yang dihadapi oleh salah satu kelompok gender dalam mengakses layanan perpustakaan. Misalnya, jika jumlah pengunjung perempuan secara signifikan lebih rendah dari laki-laki, perlu dianalisis apakah hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu karena peran domestik, kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, atau karena konten perpustakaan yang kurang relevan dengan kebutuhan mereka.

Lebih lanjut, jumlah anggota perpustakaan aktif yang terpilah berdasarkan jenis kelamin juga memberikan gambaran mengenai siapa yang merasa lebih diakomodasi oleh layanan perpustakaan. Data ini dapat menunjukkan seberapa jauh perpustakaan berhasil menjangkau komunitas pengguna secara merata. Bila ditemukan dominasi salah satu gender dalam keanggotaan aktif, maka hal ini perlu menjadi perhatian dalam merancang strategi pelayanan yang lebih inklusif.

Profil pengunjung berdasarkan usia dan jenis kelamin juga menyuguhkan informasi penting dalam upaya membentuk layanan yang responsif gender. Misalnya, remaja perempuan mungkin menghadapi tantangan khusus seperti stereotip, keterbatasan waktu karena beban rumah tangga, atau ketidaknyamanan dalam ruang publik yang tidak aman atau tidak ramah gender. Lansia perempuan, yang

umumnya lebih rentan terhadap kesenjangan teknologi informasi, juga memerlukan pendekatan literasi yang berbeda. Sementara itu, kelompok anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan ruang aman dan program yang sensitif terhadap pengembangan gender sejak dini.

Selain berdasarkan usia, distribusi pengunjung berdasarkan wilayah tempat tinggal seperti desa dan kelurahan, juga menjadi indikator penting dalam mengukur pemerataan akses layanan. Jika perpustakaan lebih banyak diakses oleh pengunjung dari wilayah perkotaan, atau jika perempuan di wilayah pedesaan lebih jarang berkunjung dibanding laki-laki, maka hal ini menjadi refleksi bahwa kebijakan dan layanan yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat secara adil. Ketimpangan akses ini dapat bersumber dari keterbatasan mobilitas, waktu, atau minimnya program yang menjangkau komunitas secara langsung.

Dari sisi kelembagaan, pelayanan perpustakaan yang responsif gender tidak hanya dilihat dari pengguna, tetapi juga dari struktur organisasi internal. Saat ini, di banyak perpustakaan termasuk di daerah, masih terjadi ketimpangan peran antara staf laki-laki dan perempuan. Umumnya, posisi operasional seperti pustakawan atau petugas sirkulasi lebih banyak diisi oleh perempuan, sementara jabatan struktural atau manajerial masih didominasi oleh laki-laki. Ketimpangan ini merefleksikan adanya bias gender dalam manajemen sumber daya manusia dan dapat memengaruhi arah kebijakan perpustakaan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah representasi dalam koleksi perpustakaan. Banyak perpustakaan masih kekurangan bahan bacaan yang merepresentasikan perspektif perempuan, serta kelompok gender minoritas lainnya. Ketiadaan koleksi yang beragam ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap inklusi dalam literasi. Padahal, literasi yang adil gender sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Lebih lanjut, tidak semua staf perpustakaan memiliki pelatihan yang memadai dalam hal pelayanan yang sensitif terhadap gender. Seringkali, pelayanan diberikan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari kelompok

pengguna yang berbeda. Misalnya, cara komunikasi dan pendekatan terhadap remaja perempuan korban kekerasan tentu berbeda dengan pendekatan terhadap lansia laki-laki. Kurangnya pelatihan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan diskriminasi tidak langsung, dalam layanan publik yang seharusnya inklusif.

Di sisi fasilitas, banyak perpustakaan belum menyediakan infrastruktur yang ramah gender. Contohnya, belum tersedianya toilet netral gender atau ruang laktasi bagi ibu menyusui. Fasilitas seperti ini sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan rasa aman bagi semua pengunjung, khususnya perempuan dan kelompok gender non-biner. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang sensitif gender, perpustakaan dapat menjadi ruang yang tidak inklusif dan bahkan eksklusif bagi sebagian kelompok masyarakat.

Program edukasi dan literasi informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan juga sering kali masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan pengalaman hidup dari perspektif gender tertentu. Padahal, kebutuhan literasi perempuan kepala keluarga, remaja putri, atau kelompok rentan lainnya sangat spesifik dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Misalnya, pelatihan keterampilan digital untuk ibu rumah tangga dapat menjadi program yang sangat bermanfaat tetapi belum banyak diadopsi oleh perpustakaan pada umumnya.

Terakhir, masih melekatnya stereotip bahwa pekerjaan di perpustakaan adalah “pekerjaan perempuan” turut berkontribusi terhadap rendahnya penghargaan terhadap profesi pustakawan. Stereotip ini tidak hanya merugikan perempuan yang bekerja di bidang ini dengan beban ganda dan kurangnya pengakuan profesional, tetapi juga menghambat partisipasi laki-laki yang ingin berkontribusi dalam pelayanan perpustakaan. Oleh karena itu, penting untuk membangun narasi baru tentang profesionalisme dan kesetaraan dalam dunia kepustakawanan.

Membangun pelayanan perpustakaan yang responsif gender bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keharusan dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif, adil, dan ramah bagi semua. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pelayanan publik, melalui langkah-langkah konkret seperti penguatan data terpilah

gender, pelatihan SDM yang sensitif gender, penyediaan fasilitas penunjang, penyusunan program literasi berbasis kebutuhan gender, serta pembaruan koleksi yang mencerminkan keberagaman perspektif. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, perpustakaan tidak hanya akan menjadi pusat informasi, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang sejati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan adalah mengadakan pelayanan perpustakaan baik perpustakaan keliling maupun pelayanan di perpustakaan daerah yang menghadirkan layanan merata, inklusif, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat kota.

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Menyediakan Akses Mudah ke Bacaan

- Perpustakaan keliling atau digital: Membangun akses ke buku melalui perpustakaan keliling di desa-desa atau aplikasi baca digital.
- Ruang baca publik: Menyediakan taman baca atau pojok baca di tempat umum seperti terminal, stasiun, taman kota, dan pasar.

2. Mendorong Literasi Sejak Dini

- Kampanye membaca di sekolah dan rumah: Mengajak orang tua dan guru untuk membacakan buku sejak anak usia dini.
- Program "Satu Buku Satu Bulan": Mengajak anak-anak atau remaja untuk membaca satu buku setiap bulan dengan hadiah atau sertifikat.

3. Membuat Konten Bacaan yang Relevan

- Buku dengan tema lokal dan budaya masyarakat: Buku-buku dengan cerita atau tokoh yang dekat dengan kehidupan pembaca lebih menarik.
- Bacaan sesuai minat dan usia: Misalnya komik pendidikan, cerita inspiratif, atau buku bertema karier dan teknologi.

4. Mengadakan Kegiatan Literasi Komunal

- Komunitas baca: Membentuk kelompok membaca di lingkungan RT/RW, sekolah, atau tempat kerja.
- Lomba dan tantangan literasi: Seperti lomba resensi buku, membaca cepat, atau *storytelling*.

5. Pemanfaatan Media Sosial dan Teknologi

- *Book influencer* atau duta baca: Mengajak figur publik, terutama yang berpengaruh di media sosial, untuk membagikan buku yang mereka baca.
- Podcast atau YouTube tentang buku: Membuat konten ulasan atau diskusi buku yang menarik dan ringan.

6. Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi

- Kampanye literasi: Mengedukasi masyarakat tentang manfaat membaca terhadap perkembangan pribadi, ekonomi, dan sosial.
- Pelibatan tokoh agama atau masyarakat: Menggunakan ceramah, khutbah, atau pertemuan warga sebagai media promosi membaca.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum untuk program dan kegiatan ini dapat berasal dari beberapa peraturan dan prinsip hukum yang relevan. Di Indonesia, sebagai contoh, beberapa dasar hukum yang mungkin relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan perpustakaan sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan budaya bagi masyarakat. Prinsip-prinsip inklusi sosial dapat diterapkan dalam konteks pengembangan layanan perpustakaan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan dan informasi. Pelatihan transformasi perpustakaan bisa mencakup peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Undang-undang ini relevan karena mengatur tentang perlindungan hak cipta, yang penting dalam pengelolaan koleksi dan informasi di perpustakaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan: Peraturan ini mencakup standar pelayanan perpustakaan di lembaga pendidikan, yang bisa diadaptasi untuk memasukkan prinsip-prinsip inklusi sosial dalam layanan perpustakaan.

Selain dasar hukum di atas, prinsip-prinsip inklusi sosial juga mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi semua individu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalam merancang pelatihan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan aksesibilitas informasi bagi semua kalangan masyarakat.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah layanan perpustakaan

E. OUTPUT KEGIATAN

1. Indikator Kinerja : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi.
2. Target Kinerja: 7 Layanan

F. OUTCOME KEGIATAN

1. Indikator Kinerja: Jumlah perpustakaan aktif
2. Target Kinerja: 700 perpustakaan

G. ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar Rp 79.000.000

H. PESERTA

Pengunjung Perpusda Kabupaten Kendal

I. TEMPAT PELAKSANAAN

Perpusda Kabupaten Kendal dan Perpustakaan Keliling

J. PENUTUP

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya menginterpretasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kendal



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19820425 200012 1 001